



*Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)*  
Volume 1, Nomor 1, Bulan April, Tahun 2024, Page 65-77  
e-ISSN: 3047-5694 (Media Online)  
Email: [jelasjips@gmail.com](mailto:jelasjips@gmail.com)  
Website: <https://naluriedukasi.com/index.php/jpipsjelas/index>



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted May 14, 2024, Approved June 14, 2024, Published July 21, 2024

## Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat di Indonesia

Ayeni Mulya Saputra<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negri Manado

Email: <sup>1</sup>[ayenimulyasaputra@gmail.com](mailto:ayenimulyasaputra@gmail.com), <sup>2</sup>[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

**Abstract.** General elections are a political system in Indonesia with the function of providing legitimacy to government governing institutions. Based on the Law, elections in Indonesia are held every five years, this implementation is regulated in Article 4 of Law No. 7 of 2017 concerning general elections, in The 2024 elections will be held simultaneously for people who have met the requirements through the general election process. The 2024 Presidential General Election will have a broad impact on various community activities, social dynamics, shaping economic trends and political engagement. In the implementation of elections, social unrest and social conflict often occur due to the fanatical support of the community for their vote which is believed to bring about change in the next five years. The aim of this research is to act as a benchmark for the implementation of elections in 2024 in the community environment because political exploitation is still often found both in people's lives directly and through social media, because it can have a negative impact on society, resulting in various cases of discriminatory violence as a result. motivated by disintegration for society, analyzing how election results influence public policy, community behavior, and national discourse. This research uses a literature review and mixed study method approach, with data collection methods by analyzing various sources, such as books, journal articles, official statistics, research reports, mass media, social media with digital search data collection processes, data processing and the use of hashtags. as well as keywords, combining quantitative data and qualitative insights to provide a comprehensive understanding of the impact of elections. The results of this research are that Indonesian society has not fully accepted the general election process because of fanatical attitudes towards their choices so that some Indonesian people cannot accept differences, especially people with low levels of education. . So this research can be used to obtain problem-solving solutions for the government in holding elections in 2029, this is with encouragement from the public who do not want turmoil in security conditions in Indonesia.

**Keywords:** Impact of elections, conflict, simultaneous elections, identity politics

**Abstrak.** Pemilihan umum yaitu suatu sistem politik di Indonesia dengan fungsi memberikan keabsahan terhadap lembaga pengatur pemerintahan, Berdasarkan Undang Undang, Pemilu di Indonesia digelar dalam rentang waktu lima tahun sekali, pelaksanaan tersebut telah diatur dalam pasal 4 Undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pelaksanaannya pemilu tahun 2024 dilaksanakan serentak bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat melalui proses pemilihan umum. Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 memiliki dampak luas terhadap berbagai aktivitas masyarakat, dinamika sosial, membentuk tren ekonomi, dan keterlibatan politik. Dalam pelaksanaannya pemilu sering kali terjadi gejolak sosial dan konflik sosial karena dukungan yang fanatik oleh masyarakat terhadap pilihannya yang diyakini akan memberikan perubahan lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai tolak ukur implementasi pemilu pada tahun 2024 di lingkungan masyarakat karena adanya eksploitasi politik yang masih banyak ditemukan baik di kehidupan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial, karena dapat memberi dampak negatif bagi masyarakat, mengakibatkan berbagai kasus kekerasan diskriminatif akibat dilatarbelakangi disintegritas bagi masyarakat, menganalisis bagaimana hasil pemilu mempengaruhi kebijakan publik, perilaku masyarakat, dan wacana nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kajian literatur dan kajian campuran, dengan metode pengumpulan data dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, statistik resmi, laporan penelitian, media masa, media sosial dengan proses pengumpulan data penelusuran secara digital, pengolahan data

dan penggunaan hastag serta keyword, menggabungkan data kuantitatif dan wawasan kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak pemilu hasil penelitian ini bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa menerima proses pemilihan umum karena adanya sikap fanatik terhadap pilihannya sehingga sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa menerima perbedaan terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh solusi pemecahan masalah bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2029 yang akan datang, hal ini dengan adanya dorongan masyarakat yang tidak menginginkan gejolak kondisi keamanan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dampak pemilu, konflik, Pemilu serentak, politik identitas

## A. Pendahuluan

Lebih dari 50 Negara di dunia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada Tahun 2024 termasuk negara Amerika, Rusia, India sedangkan Uni Eropa akan menyelenggarakan pemilihan parlemen pada bulan Juni mendatang, maka ada 4 Miliar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut sehingga hasil dari pemilihan tersebut akan menjadikan dampak politik global dalam pelaksanaan pemerintahan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi politik yang saat ini menjadi pola pemerintah dan umum digunakan di negara moderen karena semua masyarakat berhak memiliki kesempatan dan terlibat dalam menjalankan roda pemerintahannya, dalam perannya pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpin yang akan melaksanakan roda pemerintahan dalam waktu 5 tahun kedepan dan memberikan keabsahan atas kekuasaan yang ada, namun dari pelaksanaan pemilu tersebut dapat menimbulkan konflik maupun gejolak sosial yang terjadi di masyarakat akibat kefanatikan dukungan terhadap calon yang dipercaya dapat memberikan perubahan. pemilu adalah alat penting dalam demokrasi untuk menyalurkan suara rakyat dan memastikan akuntabilitas pemerintah yang terpilih (Katz, Richard S, 2020). Pemilihan presiden merupakan peristiwa penting yang mempengaruhi arah suatu bangsa. Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 khususnya telah ditandai dengan perubahan politik yang signifikan dan meningkatnya minat masyarakat.

Fanatisme yang tinggi sepertinya sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, fanatisme dijelaskan sebagai kondisi di mana individu memiliki komitmen emosional yang mendalam yang menyebabkan mereka menolak kompromi dan mengabaikan bukti atau argumentasi yang berlawanan (Katsafanas, Paul, 2020). apalagi saat menjelang pelaksanaan pemilu, fanatisme sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kemajemukan bangsa Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap suatu kelompok atau golongan yang mempunyai pemikiran sama sehingga tidak mampu memahami karakter seseorang yang berada diluar dari kelompoknya tanpa memandang apakah benar ataupun salah karena orang yang memiliki sifat fanatik itu tidak menggunakan akal fikirannya secara rasional dan memiliki pandangan yang sempit, dengan mengesampingkan fakta dan kebenaran tetapi cenderung menanggapi sesuatu dengan emosi sehingga menganggap kelompoknyalah yang selalu benar

Novelty dalam penulisan artikel ini didasarkan dari artikel sebelumnya adalah Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang, yang ditulis oleh Andre Pebrian Perdana pada tahun 2023. Memberikan kontribusi dalam memahami skema politik identitas di Indonesia, yang fokus pada pemilihan umum tahun 2024, banyak penelitian sebelumnya lebih terkonsentrasi pada pemilihan umum masa lalu atau kajian teoritis secara umum tetapi penelitian yang dilakukan oleh Andre Pebrian Perdana ini menargetkan kejadian politik yang akan datang sehingga memberikan analisis yang lebih akurat. Penulisan karil ini didorong untuk mengeksplorasi implikasi pemilu kali ini terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dampak ekonomi, perubahan sosial, dan pergeseran keterlibatan politik.

Faktanya para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat menavigasi lanskap pasca pemilu dengan lebih baik, karena melihat fenomena pada saat pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif dan pemilihan presiden selalu terjadi gejolak dan konflik sosial (Anderson, B, 2018). yang parahnya lagi konflik yang terjadi pasca pemilu terjadi berlarut larut

hingga merusak hubungan keluarga, bahkan hingga timbulnya tindakan kriminal yang saling serang, kejadian seperti ini diakibatkan oleh perbedaan dimensi moral, dalam kehidupan berpolitik seseorang dapat berbeda referensi politiknya karena mempunyai dimensi moral yang berbeda. Dengan dibuatnya penelitian ini setidaknya dapat membuka pemikiran masyarakat bahwa dukungan politik tidaklah harus sampai fanatik, paling benar dan paling bisa melakukan perubahan, penelitian ini dapat memunculkan sikap patriotisme melaksanakan pemilu sewajarnya saja tetapi tidak mengurangi dasar-dasar dari pemilu itu sendiri, menyadari bahwa perbedaanlah yang dapat membuat berjanya pelaksanaan pemilu, perbedaan pilihan menjadi hal yang wajar karena negara kita adalah negara yang demokrasi.

Adapun celah penelitian terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya intervensi kebijakan untuk mengatasi dampak negatif politik identitas, tetapi belum adanya pengujian secara efektivitas secara empiris maka penelitian berikutnya dapat merancang dan menguji adanya intervensi kebijakan dalam konteks yang nyata sehingga mengetahui tindakan paling efektif dalam mengurangi dampak negatif politik identitas. Pengaruh stabilitas politik Indonesia dan kohesi tidak berfokus pada efek jangka panjang dari politik identitas tetapi lebih kepada efek jangka pendek selama kampanye.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Supaya lebih mendalam dalam memahami implikasi Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 terhadap aktivitas di masyarakat maka kita akan membuat lima kerangka dalam teori utama.

### **1. Teori Konflik**

Divisi Sosial dan perebutan kekuasaan dapat muncul atau menguat selama pelaksanaan pemilihan umum terutama pada pemilihan Presiden, dalam konteks sosiologi dan ilmu politik teori konflik ini menekankan bahwa masyarakat dalam keadaan konflik dalam keadaan sumberdaya terbatas. Menjelang diadakannya Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas pelaksanaan Pileg dan Presiden diadakan secara bersamaan. Artinya barometer pileg 2019 takkan dipakai serta bakal memakai perolehan pileg 2014 (Power, 2018). Pemilihan umum seringkali membuat suatu kondisi dalam ketegangan sosial menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat, dalam teori konflik memberikan kerangka analisis yang kuat untuk mengerti dalam kerawanan pemilihan umum, mengelola konflik dalam rangka pemilihan umum memerlukan perhatian yang cukup serius apalagi pada Pemilihan Presiden yang memiliki potensi untuk memperburuk maupun memperbaiki konflik sosial dan perebutan kekuasaan, sehingga ada beberapa faktor kerawanan dalam pemilihan umum dalam teori konflik yaitu:

Perebutan kekuasaan, Seperti kita sadari bahwa konflik perebutan kekuasaan dalam pemilihan umum adalah hal yang lumrah dan sering terjadi di berbagai negara belahan dunia, konflik ini melibatkan berbagai aktor politik yang akan menduduki kursi jabatan baik yang akan merebut kekuasaan atau yang sedang mempertahankan kekuasaan, melalui cara-cara yang curang, perebutan kekuasaan juga bisa menyebabkan ketimpangan kekuasaan dan sangat sering juga terjadi ketimpangan kekuasaan antar kelompok minoritas dan kelompok mayoritas, biasanya kelompok yang tersisihkan melakukan tindakan yang menyebabkan konflik secara ekstrim untuk memperoleh penagkuan dalam kekuasaan. Pemilihan umum juga dapat menentukan siapa yang berkuasa dalam mengontrol sumber daya alam yang berada di wilayah kekuasaannya, konflik yang terjadi bisa disebabkan atas distribusi sumber daya yang sudah diolah terutama kelompok yang merasa tidak mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya tersebut.

Mobilisasi politik merupakan kerawanan dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah adanya politik identitas yang suku, ras, agama untuk mendukung mobilisasi masa, hal ini dapat memperburuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat antar kelompok pendukung yang berbeda sehingga memicu konflik sosial yang lebih luas. Retorika politik seperti narasi pidato yang menggunakan retorika memecah belah dan memprovokasi.

## 2. Kerangka Konsep.

Dalam konteks teori konflik, pemilu dapat dipandang sebagai ajang pertarungan terhadap berbagai kelompok dengan kekuatan dan kepentingan yang berbeda sehingga membuat ketegangan dalam konflik sosial, namun pemilu dapat mempengaruhi struktur sosial, proses politik dan ekonomi dalam masyarakat karena pemenang pemilu akan menentukan kebijakan yang akan berdampak luas pada kehidupan sehari-hari. Teori konflik yang dikenalkan oleh tokoh sosiologi seperti Karl Marx dan Max Weber, memberikan penekanan bahwa masyarakat selalu dalam kondisi ketegangan dan pertentangan karena kekuasaan dan sumber daya yang tidak sama rata. Dalam pemilihan umum 2024 teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana politik identitas dan kompetisi antar kelompok dapat mengacaukan ketegangan sosial. Pemilu sering memperlihatkan jurang perbedaan antar kelompok, etnis, kelas sosial dan agama sehingga dapat mengarah pada konflik terbuka dan tersembunyi. Penelitian ini dengan tujuan bagaimana pemilihan umum dapat berproses mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial serta bagaimana jika ada konflik sosial dapat diatasi oleh pemerintah dan masyarakat.

## C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kajian literatur dan metode campuran, dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal data statistik resmi dan laporan penelitian menggabungkan data kuantitatif dan wawasan kualitatif (John W. Creswell, 2014) untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak pemilu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh solusi pemecahan masalah bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2029 yang akan datang, hal ini dengan adanya dorongan masyarakat yang tidak menginginkan gejolak kondisi keamanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Metode ini temuannya tidak diperoleh melalui bentuk hitungan, melainkan memahami dan menafsirkan makna interaksi sosial dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Gunawan, 2015). Pengumpulan data literatur melibatkan pencarian sistematis untuk studi dan pelaporan transparan tentang identifikasi studi yang meninggalkan pembaca jelas tentang apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi studi tersebut, dan bagaimana temuan dari tinjauan tersebut ditempatkan dalam konteks bukti yang relevan (BMC Medical Research Methodology, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kajian literatur dan kajian campuran, dengan metode pengumpulan data dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, statistik resmi, laporan penelitian, media masa, media sosial dengan proses pengumpulan data penelusuran secara digital, pengolahan data dan penggunaan hastag serta keyword, menggabungkan data kuantitatif dan wawasan kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak pemilu hasil penelitian ini bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bisa menerima proses pemilihan umum karena adanya sikap fanatik terhadap pilihannya sehingga sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa menerima perbedaan terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh solusi pemecahan masalah bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2029 yang akan datang, hal ini dengan adanya dorongan masyarakat yang tidak menginginkan gejolak kondisi keamanan di Indonesia.

Analisis data (Kualitatif) dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang akibat yang ditimbulkan dari dampak pemilihan umum, serta faktor yang mempengaruhi keikutsertaan pemilih dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum, analisisnya dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses politik demokrasi, membantu mengidentifikasi implikasi sosial dan politik. Manfaatnya yaitu memberikan wawasan yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk fokus penelitian berdasarkan temuan yang timbul selama proses analisis serta mengeksplorasi isu-isu yang tak terduga.

## D. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Implikasi pemilihan umum tahun 2024 terhadap aktivitas masyarakat di Indonesia sebagai bahan penelitian proses dimana kegiatan pelaksanaan demokrasi rakyat suatu negara memilih langsung kepala negara melalui pemungutan suara yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat atau secara tidak langsung melalui perwakilan, tetapi juga tergantung oleh pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara itu. Setelah melakukan pengumpulan data penelitian melalui literasi dan analisa sosiologi tentang implikasi pemilihan umum presiden tahun 2024 terhadap aktivitas di masyarakat di Kota Surakarta yang memberikan beberapa dampak sebagai berikut.

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Dampak Konflik Sosial dan Keluarga

Politik kebangsaan Pancasila yang bersifat multi kultur secara konseptual memiliki makna sebagai anti tesis dari praktik identitas yang bersifat partikularistik (Andre, 2023).

Gambar 1.1 Konflik Pilkades di Bangkalan Madura



Sumber : (Ahmad Faisol, 2024)

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk memilih wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintahan pusat serta memilih presiden secara langsung memberikan dampak signifikan bagi pendukung yang fanatik, bagi mereka yang kalah akan mengakibatkan frustrasi, kecewa dan akan timbul kebencian kepada pemenang sehingga akan menyebabkan konflik di masyarakat, terutama pemilihan kepala desa dan banyaknya masyarakat yang fanatik menyebabkan perkelahian hingga bentrok antar RT atau antar Dusun demi membela pasangan calon masing masing contoh yang terjadi di Luwu Utara dan di Bangkalan Madura yang saling serang hingga meninggal. Terlebih lagi jika tersebar Hoax yang bergulir di lingkungan masyarakat. Kata “hoax” merupakan informasi yang secara sengaja untuk menutupi informasi sebenarnya (Septanto, 2018). Hoax bisa diunakan sebagai sarana propaganda menebar kebencian terhadap masyarakat, dampaknya meluas bahkan hingga menyetuh ke hubungan keluarga.

Gambar 1.2 Konflik keluarga karena berbeda pilihan dalam pemilu tahun 2024



Sumber : (Talia Amanda Putri, 2024)

Pemilihan umum dimanapun tempatnya masih ada pengaruh keluarga dalam menentukan pilihan maka tidak menutup kemungkinan akan muncul konflik keluarga seperti yang terjadi di daerah Rangkasbitung, Lebak, Banten berujung di usir dari rumah oleh mertuanya akibat berbeda pilihan. Salah satu implikasi negatif dari pemilihan umum adalah kemungkinan besar terjadinya konflik dalam hubungan keluarga Seperti pemilu pada umumnya bahwa calon yang mengikuti pentas pemilihan umum adalah orang-orang yang baik, sehingga dalam emnetukan pilihan tidak ada yang salah karena mereka semua akan membawa bangsa ini dalam kemajuan, tumpuan dasar kita dalam pemilu agar tidak terjebak dalam pertikaian konflik saat dalam satu keluarga tidak ada kesamaan pilihan dan yang paling penting adalah keutuhan keluarga tetap terjaga, harapan yang tinggi atas hasil kemenangan dalam pemilu dapat memicu perasaan negatif jika pasangan pilihannya tidak lolos dan kalah maka hubungan suami istri pun dapat berakhir.

Gambar 1.3 Data Perceraian Karena Beda Pilihan

**Cerai karena isu politik: Fluktuatif**

Dari data Badan Peradilan Agama yang diperoleh BBC News Indonesia, tingkat perceraian yang disebabkan persoalan politik bersifat fluktuatif.

Pada 2009, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. Lalu, pada 2010, berkurang menjadi 334 kasus.

Pada 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Namun, angka perceraian cukup tinggi karena persoalan politik terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Pemilu 2014. Angkanya mencapai 21.193 kasus.

Menurut Nina Nurmi, perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi mengingat tingkat fanatisme orang-orang yang berbeda-beda.

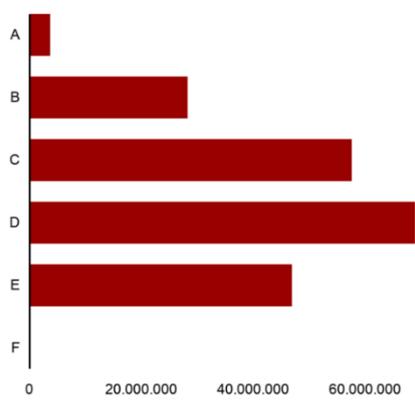
Terlebih lagi capres-cawapres hanya dua pilihan.



Sumber: (Andi Saputra, 2024)

Dalam keluarga juga akan muncul Gen Z yang tahun kelahirannya rentang 1990-an dan mereka adalah pemilih pemula, generasi muda akan cenderung apatis terlibat dalam pemilu, mereka juga tidak mudah diarahkan pilihannya oleh keluarga sehingga sangat mungkin akan menjadi sebuah konflik dalam keluarga.

Gambar 1.4. Jumlah Pemilih Pemilu 2024 berdasarkan Usia



Sumber: (Komisi Pemilihan Umum 2024)

A= Pre-bomer

C= Gen X E= Gen Z

B= Baby Boomer D= Milenial

F= Dibawah 17 Tahun (Sudah Menikah)

Akan muncul polarisasi yang mengakibatkan ketegangan sosial yang besar, terlebih lagi jika hasil pemilu tak sesuai dengan pilihan mereka maka mereka yang fanatik akan mengklaim bahwa pelaksanaan pemilihan presiden akan di nilai sebagai ada kecurangan dan tidak adil, pemilih pemula ini mempunyai sifat yang labil tetapi mudah terpengaruh oleh lingkungan bukan hanya akrena kefanatikanya tetapi hanya sekedar ikut ikutan jika ada konflik yang terjadi lingkunganya.

**b. Dampak Terhadap Kebijakan Politik**

Pemilu sering kali mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, dimana pemerintah yang baru terpilih mungkin memperkenalkan kebijakan ekonomi yang baru untuk memenuhi janji kampanye mereka. Memiliki dampak yang dapat dilihat dari aspek kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

**Gambar 2.1 Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkat menjelang Pemilu 2024**



Sumber : (Jawahir Gustav dan Kristian Erdianto,2024)

Secarar filosofis cita cita dan cita cita sosial yang dikehendaki oleh Undang Undang 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Dr. Ade Komarudin,2014). Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik 13,1 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 439,1 triliun. Setelah dilaksanakan pemilihan umum tentunya akan ada struktur pemerintahan yang baru, pergantian kekuasaan secara damai maka akan mengurangi konflik yang bisa menyebabkan kudeta terhadap pemerintahan. Sehingga memberikan legitimasi terhadap bagi kandidat yang terpilih, untuk menunjukkan bahwa yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat untuk tetap menjaga stabilitas politik dan kepatuhan hukum. Dalam sejarah perjalanan bangsa indonesia tema kesejahteraan menjadi konsep yang ikut mewarnai perdebatan mengenai sistem kenegaraan para pendiri bangsa (Komarudin, 2014). Kemenangan dalam pemilihan umum memberikan dampak politik yang signifikan, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional yang menyebabkan perubahan kebijakan baru bagi semua sektor baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor lingkungan.

**Gambar 2.2 Program PCPEN dan Alokasi Anggaran Th 2021**



Sumber: (Nurcholis Ma'arif,2021)

### c. Dampak Sosio Kultural

Stabilitas dan ketidakstabilan dalam berpolitik dilihat dari hasil pelaksanaan pemilihan umum jika diterima oleh mayoritas masyarakat dan berjalan dengan lancar tanpa adanya indikasi kecurangan maka hasil yang diperdebatkan maka dianggap pelaksanaan pemilihan umum akan dianggap tidak adil dan dapat memicu goyangnya stabilitas negara, protes, demonstrasi bahkan akan mengakibatkan kekerasan. Komunikasi masa bersifat terbuka, artinya komunikasi masa ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan sekelompok orang tertentu (Siti Karlinah, 2015).

Gambar 3.2 Aksi Demo Masa Tolak Hasil Pemilu 2024



Sumber: (Nanda Perdana Putra, 2024)

Kondisi ini akan cepat berkembang dan menyebarkan jika didukung oleh media sosial. Media sosial adalah saluran berbasis internet yang dibangun berdasarkan teknologi 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna, (Eriyanto, 2020). Pemilihan umum memiliki aspek dan dampak yang luas terhadap aspek sosio dan kultural masyarakat, dampaknya dapat memperkuat rasa nasionalisme, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan identitas nasional dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keikutsertaan partisipasi politik sehingga pemilu akan mendorong bagi kelompok, etnis, agama, dan budaya untuk merasakan menjadi salah satu dari bagian negara (Norris, P, 2014) dampaknya dapat memperburuk kondisi keamanan nasional membentuk perpecahan etnis, agama, dan budaya karena mengeksploitasi perbedaan sebagai sumber dari konflik.

### d. Dampak Politik Ekonomi

Dampak ekonomi sangat mendapat pengaruh dari pemilihan umum tetapi tergantung dari hasil pemilu karena mempunyai platform kebijakan dari pemerintah, pemilu yang transparan, jujur dan adil dapat meningkatkan stabilitas politik ekonomi tetapi pemilu yang penuh kontroversial dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. (Deddy Ahmad, 2022).

Gambar 4.1 Dampak Ekonomi dari Pemilu 2024



Sumber: (Benediktus Krisna Yogatama, 2023)

Partai yang menang pemilu itu kandidat yang ikut serta dalam pesta pemilihan umum dapat mempengaruhi apakah kebijakan yang diambil lebih mendukung investor atau mendukung rakyat tergantung platform kampanye mereka. Namun pemerintah baru yang berkuasa akan menyesuaikan anggaran untuk memperlihatkan prioritas yang dapat meningkatkan modal belanja sosial negara, pemotongan pajak maupun investasi dalam infrastruktur.

## 2. Pembahasan

Karya ilmiah ini kami susun berdasarkan hasil observasi dan penelitian menggunakan media sosial terhadap masyarakat Kota Surakarta berkaitan dengan Pemilihan umum Presiden tahun 2024 dimana walikota surakarta yang sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo ikut sebagai kompetitor, pada saat mencalonkan walikota surakarta Gibran Rakabuming Raka maju melalui partai PDI Perjuangan sedangkan Saat Pemilihan Presiden Gibran maju melalui kader partai berlambang pohon beringin, sehingga tak sedikit menimbulkan konflik dan penolakan dari berbagai macam masyarakat di wilayah Kota Surakarta, yang paling utama pelaksanaan pemilu tahun 2024 tak lepas dari politik identitas.

### a. Konflik Sosial dan Keluarga

Suatu kegiatan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh seseorang atau secara berkelompok untuk mendapatkan pengakuan kepada masyarakat lain secara luas, politik identitas ini mengarah ke cara berpolitik dengan fokus utamanya terhadap identitas tertentu yang mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan yang didasari oleh sebuah identitas seperti etnis, orientasi sosial maupun ekonomi bahkan agama sebagai pusat memperoleh dukungan politik dengan dalih memperjuangkan kelompoknya yang merasa terdiskriminasi untuk mengadvokasi kelompok mereka, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu, (Guepedia, 2022). dalam pemilihan umum kelompok-kelompok ini merasa mendapatkan ketidakadilan atau diskriminasi oleh negara dalam penyelenggaraan sistem pemerintah. Maka ada beberapa hal yang diakibatkan oleh politik identitas ini sebagai dampaknya yaitu sebagai berikut.

Terpecahnya masyarakat menjadi dua kelompok atau lebih, sehingga adanya politik identitas akan memperdalam jurang pemisah semakin dalam membuat ketegangan yang berbeda dapat meningkat dan mengancam keamanan dan stabilitas nasional, rasa solidaritas antar sesama rakyat Indonesia dapat menipis, kuatnya solidaritas untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing dapat terkikis, (McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M., 2018). politik identitas juga dapat mengakibatkan polarisasi politik yang kuat karena para pemilih mendukung calon presiden yang sesuai dengan identitas kelompoknya, dimana pemilih lebih terpolarisasi berdasarkan identitas kelompok mereka bukan karena kebijakan politik semata, semacam ini akan menghambat komunikasi produktif dan mempersulit dalam mencari solusi yang baik.

Dinamika konflik keluarga juga terjadi saat pemilihan umum karena menciptakan konflik yang mendorong perbedaan pendapat politik, sangat penting bagi keluarga untuk menjaga komunikasi yang terbuka karena adanya perbedaan pandangan politik tetapi lebih fokus terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam hubungan rumah tangga di tengah dinamika pelaksanaan politik demokrasi pemilu, meskipun anggota keluarga yang memiliki ideologi pandangan politik yang berbeda dapat menerima perbedaan dengan baik, pastinya akan banyak upaya yang mendorong terjadinya konflik tetapi sebagai keluarga yang baik harus tetap mengerti tentang perbedaan dalam berpendapat. Akibatnya mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang karena merasa pilihannya yang paling benar sehingga dengan situasi ini maka menimbulkan banyak konflik yang menyebabkan perubahan stabilitas keamanan di kehidupan masyarakat maka akan mempengaruhi aktivitas masyarakat.

## b. Dampak Terhadap Kebijakan Politik

Selain pemilihan umum, Pilkada langsung merupakan salah satu terobosan demokrasi yang sangat luar biasa karena bangsa Indonesia memiliki iktikad baik dalam menunjukkan kesungguhan untuk mewujudkan demokrasi pada setiap kehidupan masyarakat, (Sitiastuti,2014). Pada dasarnya pemerintah yang berkuasa sebagai pemenang akan mengeluarkan kebijakan publik sebagai upaya menarik simpati pemilih seperti contohnya memberikan program yang berkaitan dengan kesejahteraan (subsidi) serta peningkatan proyek infrastruktur, pemberian subsidi langsung atau pemberian bantuan dana sosial sehingga dana anggaran pemerintah akan meningkat sebelum dilaksanakan pemilihan umum dan menjadi berkurang setelah pelaksanaan pemilu (Misalnya, program pembangunan infrastruktur yang masif atau peningkatan anggaran untuk program kesejahteraan sosial dapat diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemilihan umum yang melahirkan pemerintahan baru membawa perubahan yang sangat signifikan dalam program dan kebijakan karena mereka mempunyai agenda kebijakan yang berbeda dalam platform janji politiknya. Pemerintahan baru sering menerapkan kebijakan yang sudah dijanjikan selama proses kampanye termasuk perubahan ekonomi, kebijakan sosial dan perubahan dalam kebijakan luar negeri, signifikannya perubahan terhadap kebijakan politik, pemilihan umum menentukan siapa yang akan memegang jabatan dan mempengaruhi kebijakan publik yang diambil pemerintah termasuk dalam pengambilan kebijakan sosial dalam pembangunannya baik pembangunan infrastruktur sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan politiknya serta kebijakan yang lebih fokus pada kesejahteraan sosial, seperti program bantuan pendidikan, program bantuan sosial, serta program kebijakan kesejahteraan sosial.

Kebijakan politik melalui pemilihan umum pergantian pemerintah, meningkatkan partisipasi perubahan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial, dampak ini berfasiasi tergantung pada konteks politik dan sistem pemerintahan dalam masing masing penyelenggara mekanisme pelaksanaan pemilihan umum tetapi secara umum pemilihan umum adalah mekanisme yang menentukan arah kebijakan politik dalam suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi.

## c. Dampak Sosio Kultural

Dampak yang sangat luas pelaksanaan pemilihan umum yang mendalam terhadap aspek sosio kultural dalam masyarakat, karena proses pemilihan umum dapat memengaruhi nilai budaya, norma sosial, dan dinamika komunitas serta hubungan kelompok dalam berbagai cara yaitu peningkatan ketrelibatan masyarakat memengaruhi kesadaran politik, pelaksanaan kampanye politik dan debat antar calon bakal pemimpin dapat mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam proses demokrasi, sehingga ikut membahas isu-isu serta memengaruhi gejolak yang ada dalam lingkungan mereka.

Partisipasi pemilihan umum merupakan salah satu indikator sebuah negara dalam melihat keberhasilan demokrasi negara karena moment krusial ini merupakan perjalanan sejarah yang telah berjalan sejak era reformasi, komisi pemilihan umum melakukan pemutakhiran untuk memastikan bahwa semua warga negara harus ikut berpartisipasi bagi yang sudah memenuhi syarat sehingga syarat menggunakan hak pilihnya dapat terpenuhi dan data pemilih dapat akurat untuk menghindari daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar. Secara umum partisipasi aktif masyarakat merupakan kerjasama antar pemerintah dan penyelenggara pemilu, partai politik, media dan masyarakat itu sendiri, dengan dukungan yang kuat dari semua partai politik dan masyarakat itu sendiri, dengan dukungan partisipasi yang tinggi maka akan mengkasilakan pemerintah yang demokratis.

Pemilu dapat memberikan dampak terhadap multidimensional terhadap aspek sosio kultural karena dapat memberikan konflik bagi kehidupan masyarakat pelaksanaan pemilihan umum jika diterima oleh mayoritas masyarakat dan berjalan dengan lancar tanpa adanya indikasi kecurangan maka hasil yang diperdebatkan maka dianggap pelaksanaan pemilihan umum akan dianggap tidak adil dan dapat memicu goyangnya stabilitas negara, protes, demonstrasi bahkan akan mengakibatkan kekerasan, pelaksanaan pemilu dapat memperkuat jaringan sosial dengan melakukan interaksi dan kerjasama antara masyarakat yang terlibat kampanye, tetapi disisi lain pemilu dapat memberikan dampak polarisasi dan merusak hubungan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan serta permusuhan antar kelompok.

#### d. Dampak Politik Ekonomi

Proses pemilihan umum mempengaruhi politik ekonomi suatu negara karena hasil pemilihan umum tidak hanya menentukan terpilihnya suatu pemimpin negara serta penyelenggara pemerintahan, namun juga berdampak terhadap kebijakan politik suatu bangsa yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi dan kebijakan investasi negara. Kebijakan fiskal terhadap pemerintahan yang baru melalui proses demokrasi acap kali mengubah prioritas alokasi anggaran, termasuk dana sektor tertentu maka akan mengubah dan mempengaruhi pengeluaran dana APBN, sehingga pemerintah baru harus mencari cara untuk mengembangkan anggaran yang bisa mendapatkan anggaran baru untuk memenuhi janji-janji politiknya.

Kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi termasuk kebijakan suku bunga maka pemerintahan baru sebagai pemenang pentas pemilihan umum sangat memungkinkan akan mempengaruhi suku bunga, kebijakan suku bunga mengeluarkan pengaruh terhadap bank central karena perubahan itu dapat mempengaruhi inflasi, investasi serta pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya pemilu yang menghasilkan ketidakpastian politik dapat merusak stabilitas ekonomi, serta tentang kebijakan ekonomi masa depan dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor.

Hubungan ekonomi internasional suatu negara terutama pemerintah terpilih dapat mempengaruhi perjanjian dagang, pembatalan perjanjian dagang internasional dan reorganisasi dapat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor dan hubungan ekonomi dengan negara lain. Jangka panjangnya terhadap ekonomi stabilitas dan kebijakan ekonomi secara berkelanjutan tergantung dari hasil pelaksanaan pemilu karena pergantian kendali pemerintah sering dapat menyebabkan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten dan mengganggu perencanaan program jangka panjang, ditambah lagi perubahan reformasi struktural yang berdampak jangka panjang terhadap perekonomian. Dampak signifikannya pergantian pemerintah membawa perubahan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan dan investasi serta mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

## E. Kesimpulan

### 1. Simpulan

Pelaksanaan pemilihan umum memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, kegiatan ekonomi dapat berubah akibat perubahan kebijakan dan prioritas dari pemerintah yang baru, termasuk pengerjaan proyek infrastruktur. Pemilihan umum juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam menuntut transparansi kejujuran dan akuntabilitas dari para penyelenggara pemilu. Kesadaran politik dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosial dan komunitas. Dampak sosio kultural di masyarakat berjalanya proses pemilihan umum yang meningkatkan kesadaran keikutsertaan masyarakat, proses kampanye, debat calon dan pelaksanaan pemilihan umum mendorong masyarakat lebih aktif terlibat dalam diskusi politik dan memahami isu-isu politik. Tetapi pemilu juga dapat memperdalam polarisasi sosial antara berbagai kelompok yang menyebabkan ketegangan konflik sosial, akan tetapi peran penting media masa juga dapat membentuk opini publik, diskursus politik yang positif maupun yang negatif. Dalam suhu politik yang memanas pasca pemilihan umum yang menghasilkan perubahan signifikan pergantian pemerintahan berdampak terhadap prioritas kebijakan. Jika pemilu dianggap tidak adil penuh dengan kecurangan maka akan menyebabkan konflik untuk menuntut keadilan, sehingga pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi.

Dampaknya bagi kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru dan terpilih dalam pelaksanaan pemilu maka kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi investasi, pertumbuhan ekonomi dan

investasi. Ketidak pastian politik selama pelaksanaan pemilihan umum dapat mengurangi keyakinan investor serta menyebabkan fluktuasi di pasar keuangan. Tetapi pemerintah yang terpilih mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan mandat sehingga mampu mendorong reformasi ekonomi yang diperlukan dalam jangka 5 tahun kedepan. Pemilu 2024 di Indonesia membawa berbagai implikasi terhadap aktivitas masyarakat, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Di sisi lain, pemilu juga berpotensi memicu konflik sosial dan memperdalam polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengelola proses pemilu dengan bijak dan memastikan integritas serta transparansi dalam setiap tahapannya.

## 2. Saran

Pengawasan Pemilu. Memperkuat pengawasan pemilu untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Kampanye edukasi politik. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, media massa semua yang bisa berperan aktif harus bekerjasama dalam kelancara pelaksanaan pemilihan umum maka perlu meningkatkan edukasi politik untuk masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi yang sehat dalam pemilu. Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan maka komisi pemilihan umum harus dapat meyakinkan masyarakat dan memberikan jaminan pelaksanaan pemilu yang transparansi dan akuntabilitas jika diperlukan maka perlu adanya kerjasama dengan lembaga pengawas yang independent untuk memonitor setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum, untuk mengantisipasi adanya kecurangan.

## F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga kami bisa menyelesaikan dalam menulis karya ilmiah dengan judul “ Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Di Masyarakat Indonesia” ini dengan sebaik baiknya, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

3. Bapak Romi Mesra, selaku dosen pembimbing universitas Terbuka kami mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, nasehat serta dukungannya yang diberikan selama proses penulisan karya ilmiah ini. Tanpa bimbingan dan arahnya belum tentu kami bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik baiknya.
4. Bapak Ibu dan seluruh staf di Universitas Terbuka FHISP Program studi Sosiologi yang telah memberikan fasilitas serta dukungan administratif sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini dengan lancar.
5. Rekan rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang telah memberikan dukungannya dengan maksimal bantuan moral dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Seluruh narasumber dan responden semoga karya karyanya dapat bermanfaat, partisipasi dan kontribusinya sangat berarti bagi kami.
7. Keluarga tercinta terutama istri terkasih yang selalu memberikan suport dan dukungannya serta memberikan motivasi tiada henti hentinya kami mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan karya ilmiah ini belum dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan karya ilmiah kami dimasa yang akan datang, kata penutup dari kami semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat.

## G. Daftar Pustaka

- Anderson, B.(2028). Navigating Post-Election Landscape: Policy Makers and Stakeholders in Democratic Societies. *Journal of Political Science*, 45(3), 123-145.
- Buchari Sitiastuti. *Kabangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2024.
- Deddy Ahmad, Dian Mafulla dan Farah Nur. *Signifikansi Dampak Pemilu 2024 Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Mojokerto: 2022.  
[https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_el-idaarah/article/download/76/88](https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/download/76/88)
- Diamond, Larry, dan Marc F. Plattner. *Electoral System and Democracy*. Johns Hopkins University Press, 2016
- Elvinaro, Adrianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah. *Komunikasi Maassa*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2015.
- Eriyanto. *Analisis Jaringan Media Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020
- Katsafanas, Paul. *The Phiosophy of Fanaticm*. Taylor & Francis, 2020
- Katz, Richard S. *Democraton and Election*. Oxford University Press, 2020.
- Komarudin, Ade. *Politik Hukum Integratif UMKM*. Jakarta: Rmbooks. 2014
- Marijan Kacung. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- McCoy,J.,Rahman,T.,&Somer,M.(2018). Polarization and the Global Crisis Democracy. *Common patterns, Dynamics, and Pernicious Consequenses For Democratic Polities*. *American Behafitorial Scientist*, 62(1), 16-42.
- Norris,P. *Why Election Fail*. Cambridge University Press. 2014.
- Perdana Andre. *Dampak Pelaksanaan Presidential Trheshold pada Pemilu Serentak terhadap Deokrasi Indonesia*. Lampung: 2023. .  
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/400>.
- Power, Thomas P. (2018). *Jokowi`s Authoritarian Turn and Indonesia`s Democratic Decline*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol.54,(No.3),pp.307-338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Rahmawati, D., et al. "Pemilu dan Konflik Keluarga di Indonesai." *Jurnal Ilmu sosial*. Vol.12, no. 1,2029, pp.34-49.
- Septanto, H. (2018). *Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat*. *Jurnal Kalbiscientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 157-162.
- Yasinta Dyah. *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Indonesia*. Semarang: 2023.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/erticle/viev/15498>.